

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Filosofi dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 ditentukan mengenai perhitungan pembagian besaran Dana Desa. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Sumber dan besaran dana desa dapat dilihat didalam pasal 12 yang menyebutkan secara detail. *Pertama*. Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya. *Kedua*, Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis. Dan yang *Ketiga*. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot:

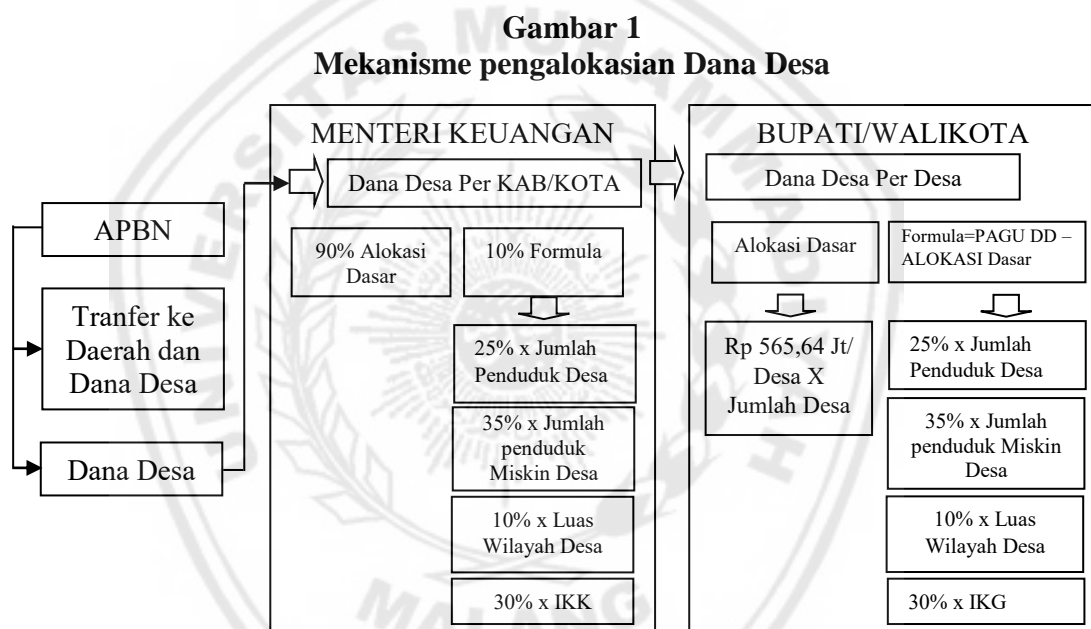
- a. 30% (tiga per seratus) untuk jumlah penduduk Desa.
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa.
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud di tentukan oleh faktor:

- a. Ketersediaan pelayanan dasar
- b. Kondisi infrastruktur
- c. Transportasi

2. Mekanisme Pengalokasian APBN

Mekanisme pengalokasian Dana Desa sebagaimana didalam PKK 247/2015 pasal 2 sampai pasal 10 dapat dilustrasikan sebagaimana gambar 1 berikut ini:



Sumber: PP Menkeu No 247/PMK.07/2015

3. Proses Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana sebagai mana termuat didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Untuk penyaluran dana desa sebagaimana diatur didalam pasal 18 tahap pertama disalurkan apabila bupati/walikota telah menerima. Peraturan desa mengenai APBDesa, dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya. Untuk

penyaluran tahap kedua pasal 19 menyebutkan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap pertama dari kepala desa, dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap pertama sebagaimana dimaksud paling tidak tahap pertama digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).³⁴

Penyaluran dana desa akan dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan dengan syarat peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri dan APBD kabupaten/kota telah ditetapkan. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan. Apabila APBDes belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan, Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan

³⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/016. Pasal 18 dan 19

penggunaan Dana Desa. Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang di danai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan.

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Peamafaatan Pembangunan

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2015 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk menyelenggarakan 3 bidang, yaitu:

a. Pembangunan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pasal 5 sampai pasal 10. Penggunaan untuk pembangunan desa dimaksudkan Dana Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain: pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana Desa, yang diantaranya dapat meliputi: pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan

embung Desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budi daya perikanan, dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

- 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal, meliputi: pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, pengelolaan padang gembala, pengembangan Desa Wisata, pendirian dan pengembangan BUM Desa, pembangunan & pengelolaan tambatan perahu, pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan, pengembangan benih lokal, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung, pembuatan pupuk dan pakan organik, pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dan pembangunan dan pengelolaan pasar desa
- b. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi: komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan milik desa, dan pengelolaan sampah.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pasal 11. Penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- 1) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- 2) Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- 3) Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4) Pengorganisasian melalui dan pembentukan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- 5) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- 6) Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui: kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Di dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor 959/KMK.07/2015, Nomor 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan, rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana dan pengembangan infrastruktur. Dalam suatu proyek infrastruktur penjadwalan waktu berperan sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan proyek. Menurut Kareth (2012).³⁵ pengaturan waktu atau penjadwalan dari kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam suatu proyek dimaksudkan agar suatu proyek dapat berjalan dengan lancar serta efektif. Oleh karena itu, pihak pelaksana dari suatu proyek biasanya membuat suatu jadwal waktu kegiatan atau *time schedule*. Sudarsana (200)³⁶ menyebutkan bahwa pada tahap pelaksanaan suatu proyek terdapat tiga jenis sumber daya utama suatu proyek. Sumber daya yang terbatas tersebut adalah biaya, mutu dan waktu. Perencanaan, penjadwalan dan pengendalian adalah langkah penting untuk dilakukan agar tujuan pelaksanaan proyek dengan sumber daya terbatas ini tercapai. Masih menurut Kareth (2012).³⁷ memperpendek durasi proyek terhadap durasi normalnya akan memerlukan peningkatan sumber daya seperti

³⁵ Kareth, Michael, et al. 2012. Analisis Optimalisasi Waktu dan Biaya Dengan Program Primavera 6.0 (Studi Kasus: Proyek Perumahan Puri Kelapa Gading). Jurnal Sipil Statik Vol.1 No. 1. hal 53

³⁶ Sudarsana, Dewa Ketut. 2008. *Pengendalian biaya dan Jadwal terpadu pada proyek konstruksi*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol. 12, No. 2. hal. 117-125

³⁷ *Ibid.* 59

tenaga kerja, material dan lain sebagainya. Hal ini mempunyai resiko terjadinya penambahan biaya langsung, atau dengan kata lain akan menyebabkan pemborosan dalam proyek tersebut.

Adapun penggunaan Dana Desa yang di atur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- 1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:³⁸
 - a) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:³⁹
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan alam desa;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan Embung desa;

³⁸ Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

³⁹ *Ibid.* Pasal 8

- d) Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- 3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMdes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi;
- a) Pendirian dan pengembangan BUMDes;
 - b) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - c) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - d) Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e) Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - f) Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g) Pengembangan beni lokal;
 - h) Pengembangan ternak secara kolektif;
 - i) Pengembangan dan pengelolaan energi mandiri;

- j) Pengembangan dan pengelolaan jembatan perahu;
 - k) Pengelolaan padang gembala;
 - l) Pengembangan Desa Wisata dan;
 - m) Pengembangan teknologi tempat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan oleh kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:⁴⁰
- a) Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain *zircon*, *kaolin*, *zeolite*, *bentonit*, *silika* (pasir kuarsa), *kalsit* (batu kapur atau gamping), *felspar* dan intan.
 - b) Komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang, (*chert*), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - c) Rumput laut;
 - d) Hutan milik desa; dan
 - e) Pengelolaan sampah.

Sedangkan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya

⁴⁰ *Ibid.* Pasal 9

ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- 1) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- 2) Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- 3) Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- 5) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- 6) Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus mendapatkan persetujuan dari bupati atau walikota. Persetujuan bupati tersebut diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes.

Dalam memberikan persetujuan terkait penggunaan dana di luar prioritas tersebut, bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Dalam penggunaan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada bupati atau walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Semester 1, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Semester 2, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester 1 menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap 2 tahun anggaran berjalan sedangkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester 2 menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap 1 tahun anggaran berikutnya.

B. Implementasi Dana Desa

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.⁴¹

Adapun Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung-

⁴¹ <http://kec-buayan.kebumenkab.go.id/wp-content/uploads/2015/11/buku-pintar.pdf>.

jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh

adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 5) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa

3. Proses Penganggaran Dana Desa

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses Penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk evaluasi;
- e. Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterima Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati atau Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati atau Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung saat diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati atau Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati atau Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;

- f. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

4. Laporan Penggunaan Dana Desa

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari Buku kas Umum dan Buku Bank. Penerimaan maupun pengeluaran baik Kas Tunai maupun Rekening Kas Desa diperoleh dari jumlah kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada BKU dan Buku Bank. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan saldo sesuai pembukuan dengan saldo riil berupa kas tunai dan di Rekening Kas Desa. Hal ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan kepala desa.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester pertama dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran

5. Pertanggung Jawaban Dana Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Laporan Dana Desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan panduan ini selesai disusun, belum ada ketentuan yang mengatur tentang format Laporan Dana Desa yang harus disampaikan oleh desa dan format kompilasi yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal yang bisa menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa adalah Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Hal yang perlu menjadi perhatian terkait penggunaan Dana Desa adalah SiLPA Dana Desa. Bupati/walikota memberikan sanksi administrasi berupa pengurangan Dana Desa jika SiLPA-nya tidak wajar ($\pm 30\%$), yang

dikarenakan penggunaan tidak sesuai dengan prioritas atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

C. Landasan Teori Pengelolaan Keuangan Negara

1. Asas Umum Pengelolaan Keuangan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁴² Sementara itu menurut Saidi. Keuangan Negara dalam arti luas mengandung substansi yang tidak terbatas hanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Keuangan Daerah

Mardiasmo (dalam Subroto 2008) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen Keuangan Daerah dapat dibagi menjadi dua bagian.⁴³ Yaitu manajemen pemerintahan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

⁴² Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Edisi Revisi. hal. 11

⁴³ Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Tamanggung 2008)*

Peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 66 Ayat 1 menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output*, serta prinsip tata pemerintahan yang baik, *good governance*. Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 39). Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, setiap penggunaan anggaran/kuasa pengguna, bendahara penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan pentausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Kedua hal tersebut merupakan asas umum penatausahaan keuangan daerah.

3. Anggaran

- a. Walidi (dalam Frelistiyani 2010).⁴⁴ Mengatakan bahwa anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan social dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Menurut Mulyadi (dalam Putri 2015).⁴⁵ Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

⁴⁴ Frelistiyani, Winda. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Semarang : Universitas Diponogoro. hal.19

⁴⁵ Putri, Nesya Windia. 2015. *Studi Eksploitatif tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya*. Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3, Nomor 1, Januari-April 2015. hal.4

- c. Menurut Alim (2008).⁴⁶ Sistem Anggaran memiliki fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, koordinasi, evaluasi (pengendalian), dan umpan balik. Terkait dengan fungsi manajerial maka antara satu komponen anggaran dengan komponen anggaran lain memiliki *time sequence*.

Perencanaan sangat penting artinya sebagai landasan metodis dari langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah. Perencanaan dilakukan guna menganalisis permasalahan-permasalahan yang mungkin, sedang, dan telah dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Permasalahan yang mungkin dihadapi perlu diantisipasi untuk menyiapkan kerangka solusinya. Permasalahan yang dihadapi dapat dipergunakan sebagai *input* untuk mencegah preseden negatif pada masa mendatang atau justru diperlukan untuk membentuk kerangka berpikir guna mengatasi permasalahan yang identik di kemudian hari, sedangkan permasalahan yang telah dihadapi dapat memberikan pelajaran yang berharga sebagai dasar bagi suatu studi kebijakan.

⁴⁶ Alim, M. Nizarul. 2008. Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontijensi Matching. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 10 No. 2. hal. 69-76